



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68756);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.3821/XII/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.110.234.142.913,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.507.521.720.617,00, yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.315.692.104.714,00;
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.015.796.462,00;
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.613.819.441,00;
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.315.692.104.714,00, terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;

- c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.364.152.000,00;
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.349.130.000,00;
 - (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.155.400.000,00;
 - (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.035.999.000,00;
 - (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.33.479.268.315,00;
 - (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.800.630.000,00;
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.92.784.506.368,00;
 - (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.62.761.807.164,00;
 - (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.73.961.211.867,00;

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.114.015.796.462,00,

terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.745.659.462,00;
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.270.137.000,00;
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00.

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.74.613.819.441,00, terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.983.437.441,00;
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.630.382.000,00.

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00, terdiri atas:

- a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - d. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00;
 - (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00;
 - (4) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00;
 - (5) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00.

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.602.712.422.296,00, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.479.750.370.000,00;
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.962.052.296,00.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.2.479.750.370.000,00, terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan

e. Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.331.167.000,00;
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.097.510.000,00;
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.602.334.119.000,00;
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.097.527.308.000,00; dan
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.530.460.266.000,00.

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.122.962.052.296,00, terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.962.052.296,00.

Pasal 12

Belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.145.234.142.913,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.417.987.202.730,20, yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.459.936.604.492,23;
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.862.226.661.237,97;
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.90.186.527.000,00;
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.637.410.000,00.

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.459.936.604.492,23, terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.850.487.256.905,35;
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.552.718.490.082,88;
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.290.094.369,00;
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.174.451.868,00;
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.154.401.500,00;

- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.111.909.767,00.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.862.226.661.237,97, terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.285.180.666,97;
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.357.022.310.098,00;
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.184.191.089,00;
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.132.698.899.080,00;
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.260.546.720,00;
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.85.125.556.800,00;
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.649.976.784,00.

Pasal 16

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.90.186.527.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belana hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00;
- (3) Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.912.910.000,00;
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.042.417.000,00;
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.631.200.000,00.

Pasal 17

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.5.637.410.000,00, terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.410.000,00; dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.600.000.000,00.

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.381.905.725,80, terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.444.000.000,00;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.114.209.985,00;
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.580.939.299,00;
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.143.912.641.281,80;
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.580.115.160,00; dan
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.444.000.000,00, terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.444.000.000,00.

Pasal 20

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.69.114.209.985,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.657.848.250,00;
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.662.151.649,00;
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.719.773.530,00;
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.750.283.928,00;
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.488.282.700,00;
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.385.982.000,00;
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.826.378.977,00;

- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.370.325.500,00;
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.473.450.000,00;
- (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.99.750.000,00;
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.175.710.540,00;
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.504.272.911,00.

Pasal 21

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.55.580.939.299,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.346.503.299,00; dan
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.234.436.000,00.

Pasal 22

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.143.912.641.281,80, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.123.386.838.011,88;
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.231.233.269,92;
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.820.000.000,00; dan
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.474.570.000,00.

Pasal 23

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.23.580.115.160,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.965.500,00;
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.925.000.000,00;
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.300.149.660,00; dan
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00.

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00; dan
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00.

Pasal 25

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00.

Pasal 26

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.425.865.034.457,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.033.313.707,00; dan
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.406.831.720.750,00.

Pasal 27

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.19.033.313.707,00,

yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.896.908.569,00; dan
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.136.405.138,00.

Pasal 28

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.406.831.720.750,00, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.406.831.720.750,00.

Pasal 29

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00.

Pasal 31

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00, yang terdiri atas penghematan belanja;
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00.

Pasal 32

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00;
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00;
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00;
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00;
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 33

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.35.000.000.000,00;
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00.

Pasal 34

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak

Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/
Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19671021 200012 1 001



KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.521.720.617,00
4.1.01	Pajak Daerah	315.692.104.714,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.364.152.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.364.152.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.364.152.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.349.130.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.349.130.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.349.130.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	155.400.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	155.400.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	155.400.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.035.999.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.035.999.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.035.999.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.479.268.315,00
4.1.01.15.01	PBBP2	33.479.268.315,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	33.479.268.315,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	45.800.630.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	45.800.630.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	45.800.630.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	92.784.506.368,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.970.422.524,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.970.422.524,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	79.076.263.873,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	75.349.122.273,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	3.727.141.600,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	2.540.997.200,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	2.540.997.200,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	119.658.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	119.658.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.077.164.771,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.077.164.771,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	62.761.807.164,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.01	Opsen PKB	62.761.807.164,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	62.761.807.164,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	73.961.211.867,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	73.961.211.867,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	73.961.211.867,00
4.1.02	Retribusi Daerah	114.015.796.462,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	103.745.659.462,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.781.659.462,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	38.899.659.462,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	63.807.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	75.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	104.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	54.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	19.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	31.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	360.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	285.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.270.137.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	43.000.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	43.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	250.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	250.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	549.150.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	549.150.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.427.987.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.427.987.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.613.819.441,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	73.983.437.441,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.833.437.441,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.833.437.441,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	50.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	50.000.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	630.382.000,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	630.382.000,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	630.382.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.200.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	200.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.602.712.422.296,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.479.750.370.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	234.331.167.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	234.331.167.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	234.331.167.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.097.510.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.097.510.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.097.510.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	602.334.119.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	338.713.472.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	319.491.463.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	18.523.032.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	698.977.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	246.194.216.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	218.362.849.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	18.361.761.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	660.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.619.898.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.015.243.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	17.426.431.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	17.426.431.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.097.527.308.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	823.678.759.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	823.678.759.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	273.848.549.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	87.675.213.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	110.377.766.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.521.803.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	35.673.767.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	530.460.266.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	94.674.061.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	4.004.695.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	334.540.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	313.474.000,00
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	11.719.639.000,00
4.2.01.09.01.0102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar	40.193.489.000,00
4.2.01.09.01.0104	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	27.554.065.000,00
4.2.01.09.01.0110	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar	1.800.238.000,00
4.2.01.09.01.0114	DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	7.211.520.000,00
4.2.01.09.01.0117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	1.542.401.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	435.786.205.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	128.478.212.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.062.250.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	11.332.455.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.146.900.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	14.433.448.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	461.392.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	223.752.843.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	4.601.250.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	9.819.859.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.851.200.000,00
4.2.01.09.02.0040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	25.490.736.000,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.962.052.296,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.962.052.296,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122.962.052.296,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	77.111.475.398,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.010.029.102,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	43.840.547.796,00
	Jumlah Pendapatan	3.110.234.142.913,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.417.987.202.730,20
5.1.01	Belanja Pegawai	1.459.936.604.492,23
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	850.487.256.905,35
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	662.433.983.243,35
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	393.767.352.581,35
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	268.666.630.662,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	55.645.405.659,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.520.765.720,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.124.639.939,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.248.378.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.248.378.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.623.574.175,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.833.298.750,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.790.275.425,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.639.874.125,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.605.964.125,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	33.910.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.419.851.533,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.230.700.108,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.189.151.425,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	923.686.518,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	923.686.518,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.117.073,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.666.652,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.450.421,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.821.933.466,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.538.201.170,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.283.732.296,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.181.706.665,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	808.581.845,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	373.124.820,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.542.745.698,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.423.421.999,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.119.323.699,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	552.718.490.082,88
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	286.338.509.038,68
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	238.848.766.192,68
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	47.489.742.846,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.848.274.781,20
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.848.274.781,20
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.679.174.344,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.679.174.344,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.852.531.919,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	102.840.612,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	102.187.155,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	6.759.900,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	88.565.956,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	582.539.268,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.992.327.405,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.036.126.024,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.187.500,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.200.000,00
5.1.01.02.06.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.508.500,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.287.599,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	15.832.000,00
5.1.01.02.06.0048	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	13.775.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	451.250.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	223.752.843.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	9.819.859.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.601.250.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	206.693.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.290.094.369,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.043.837.313,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.043.837.313,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.493.621.157,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.493.621.157,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.046.050,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.046.050,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.276.500.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.276.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	539.704.389,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	539.704.389,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.271.956.494,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	114.727.622,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.150.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.150.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.150.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.451.868,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.154.401.500,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	761.281.500,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	761.281.500,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	26.111.909.767,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	26.111.909.767,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	26.111.909.767,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.226.661.237,97
5.1.02.01	Belanja Barang	127.285.180.666,97
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	118.573.766.174,57
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.147.519.940,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.376.492.492,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.639.703.450,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	122.374.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	89.821.900,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	736.391.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	93.536.700,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.440.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	996.270.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.024.355.400,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.365.145.953,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	30.450.500,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.695.833.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	10.343.700,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	13.383.600,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.795.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	477.042.610,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.192.800.934,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.087.009.191,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.553.510.090,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	683.462.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	422.084.380,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.192.104.843,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.446.857.900,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.370.953.880,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	325.258.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	883.140.125,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	282.050.294,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	168.809.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.428.360.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.132.859.262,57
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	245.000.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.532.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.531.365.580,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.804.035.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.897.638.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.255.185.150,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	33.750.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	174.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.605.250,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	303.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	63.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	46.189.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.148.172.600,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	554.775.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.258.807.750,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	168.300.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	470.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	470.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.710.944.492,40
5.1.02.01.04.0049	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.500.000,00
5.1.02.01.04.0052	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.01.04.0077	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	947.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	314.490.000,00
5.1.02.01.04.0268	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	9.242.600,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.940.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	815.250.000,00
5.1.02.01.04.0492	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	32.164.000,00
5.1.02.01.04.0515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	6.427.482.500,00
5.1.02.01.04.0647	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	1.071.928.392,40
5.1.02.02	Belanja Jasa	357.022.310.098,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	245.148.945.421,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.774.075.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.843.660.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	151.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.548.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.112.150.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	473.700.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.832.500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.305.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	33.923.522.500,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.807.015.406,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	971.791.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	693.810.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13.492.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.081.160.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	574.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	800.400.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	264.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	549.120.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	180.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.156.887.900,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.516.300.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	892.100.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.215.440.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.366.650.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.875.353.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.959.520.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	3.150.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	253.635.200,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	111.300.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.400.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.437.975.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	72.750.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	33.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.727.475.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	175.310.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	763.762.700,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.820.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.740.300.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	32.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.155.254.300,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.122.460.865,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	786.960.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.747.199.540,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	504.639.010,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	61.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	113.900.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.179.000.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.771.706.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	931.992.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.914.986.974,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.483.982.176,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	48.855.905.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.525.056.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.398.399.798,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	640.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	435.200,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.900.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	980.160.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	666.508.800,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	99.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	96.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.072.566.120,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	80.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	217.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.605.260.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	26.000.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.679.200.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.075.040.500,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	13.800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	264.394.320,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	143.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	39.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	209.300.000,00
5.1.02.02.04.0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan	5.300.000,00
5.1.02.02.04.0316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	869.000,00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	52.152.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	395.118.400,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	30.909.800,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	21.674.400,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	14.522.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	7.998.000,00
5.1.02.02.04.0447	Belanja Sewa Masker	2.968.000,00
5.1.02.02.04.0450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan	445.200,00
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	32.226.000,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	23.035.000,00
5.1.02.02.04.0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	71.595.000,00
5.1.02.02.04.0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan	18.258.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.729.004.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.680.579.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	95.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.846.025.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	107.400.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	269.732.900,00
5.1.02.02.07.0001	Belanja Sewa Buku Umum	63.818.500,00
5.1.02.02.07.0004	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial	24.880.000,00
5.1.02.02.07.0011	Belanja Sewa Buku Laporan	53.000.000,00
5.1.02.02.07.0018	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran	3.434.400,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	55.600.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	59.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	10.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.048.128.340,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	86.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	863.300.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.417.955.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	33.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	4.113.423.850,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	266.428.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.743.021.490,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.345.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	130.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	794.900.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	634.900.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	945.238.383,00
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	945.238.383,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	1.098.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	788.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	310.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.864.700.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.308.960.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.555.740.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.037.107.960,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.366.988,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	15.269.345,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.010.100,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.233.994,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.091.424.147,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	297.704.095,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	603.099.291,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	79.184.191.089,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	55.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	55.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.276.386.640,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	815.000.000,00
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	96.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.081.330.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	17.400.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	16.200.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.783.376.800,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	117.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	958.296.800,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.047.800,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	113.172.800,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	826.510.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	203.980.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.281.266.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	199.193.440,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	756.074.500,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	37.500.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	240.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	528.038.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.283.318.349,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.741.918.349,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	40.800.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	199.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.805.600.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	496.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.369.486.100,00
5.1.02.03.04.0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	7.626.576.100,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.476.000.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	50.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.200.000.000,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	792.750.000,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	124.160.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	100.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	200.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	132.698.899.080,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	132.393.979.080,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.161.086.180,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	73.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.112.192.900,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46.800.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	304.920.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	304.920.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.260.546.720,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.260.546.720,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.192.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	389.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.679.296.720,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	85.125.556.800,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	73.259.107.800,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	70.196.857.800,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.062.250.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	9.080.964.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	9.065.964.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	2.785.485.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.695.485.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.649.976.784,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.649.976.784,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.649.976.784,00
5.1.05	Belanja Hibah	90.186.527.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.912.910.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.349.750.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.450.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.899.750.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.660.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.460.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	54.353.160.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.250.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	51.103.160.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.550.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.550.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.042.417.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.042.417.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.042.417.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	20.631.200.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	20.631.200.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	20.631.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.637.410.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	37.410.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	37.410.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	37.410.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.600.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.600.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.600.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	294.381.905.725,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.444.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.444.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.444.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.444.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.114.209.985,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.657.848.250,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.500.000.000,00
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	1.500.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	157.848.250,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	7.392.000,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	37.100.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	10.000.000,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	21.300.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	82.056.250,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.662.151.649,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.498.548.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.065.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	475.248.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	545.300.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	413.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	400.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	160.000.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	240.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	763.603.649,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	113.603.649,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	650.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.719.773.530,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	570.654.330,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	570.654.330,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	3.149.119.200,00
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	1.334.393.200,00
5.2.02.03.03.0007	Belanja Modal Universal Tester	1.536.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.813.190.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.750.283.928,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	960.284.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	58.800.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	258.224.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	643.260.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.577.499.928,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.539.318.368,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	7.065.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	881.154.560,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.967.697.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	182.265.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.212.500.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	52.500.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.160.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.488.282.700,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.404.532.700,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	398.117.700,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	884.815.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	121.600.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	83.750.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	50.000.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	33.750.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.385.982.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	204.000.000,00
5.2.02.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	4.000.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	200.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.871.000.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	171.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	600.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	600.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	500.000.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.310.982.000,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.310.982.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.826.378.977,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.707.066.111,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.344.349.411,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	362.716.700,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.119.312.866,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	692.089.490,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	134.484.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.292.739.376,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	370.325.500,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	370.325.500,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	94.470.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	223.963.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	51.892.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.473.450.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.473.450.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.473.450.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	99.750.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	99.750.000,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	99.750.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	20.175.710.540,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	18.337.492.040,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	18.337.492.040,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	1.133.245.500,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	1.133.245.500,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	704.973.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	704.973.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.504.272.911,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.504.272.911,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.504.272.911,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.580.939.299,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	44.346.503.299,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.346.503.299,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.873.886.299,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	170.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.354.054.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.058.440.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	304.024.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	744.570.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.642.530.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	198.999.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.234.436.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	11.234.436.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	140.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	10.415.436.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	679.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.912.641.281,80
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	123.386.838.011,88
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	119.486.066.011,88
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	30.695.968.352,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	81.641.902.575,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	7.148.195.084,88
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.900.772.000,00
5.2.04.01.02.0001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional	3.900.772.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.231.233.269,92
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15.991.233.269,92
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	307.500.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	15.683.733.269,92
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	140.000.000,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	140.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	500.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	500.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.820.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.820.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.820.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.000.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	474.570.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	474.570.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	474.570.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.580.115.160,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	300.965.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	300.965.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	300.965.500,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.925.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.925.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.925.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	21.300.149.660,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	19.420.462.160,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	19.420.462.160,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	1.133.245.500,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	1.133.245.500,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	746.442.000,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	746.442.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	54.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	54.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	54.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	350.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	350.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	350.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	425.865.034.457,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.033.313.707,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.896.908.569,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.896.908.569,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.896.908.569,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.136.405.138,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.136.405.138,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.136.405.138,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	406.831.720.750,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	406.831.720.750,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	406.831.720.750,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	5.042.780.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	234.331.167.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	167.457.773.750,00
	Jumlah Belanja	3.145.234.142.913,00
	Total Surplus/(Defisit)	-35.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	35.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	3.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	32.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	32.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	35.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kampar, 31 Desember 2024

Pj Bupati

HAMBALI